

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN OESAPA BARAT KOTA KUPANG

Fransisca X.S Lio dan Stefanus Stanis

Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang-Nusa Tenggara Timur
Email: fransiscaserafina@gmail.com

ABSTRACT

One of the districts in East Nusa Tenggara that has mangrove forests along the coastline is Kupang City, particularly West Oesapa region. Based on the result of preliminary observation, mangrove forest has been used as a recreational area. On the other hand, the partially of mangrove forest area has been earmarked for aquaculture area and it is an early indication of mangrove forest damage. In order to ensure the sustainability, the conservation efforts are needed which couldn't be separated from community participation. Therefore, the need for a study about the community participation degree in conserving mangrove forest. A total of 30 respondents are interviewed using a questionnaire, taken by purposive. In-depth interviews are conducted to 5 villagers as key informants. Data include socio-economic conditions, knowledge, perception, and community participation on mangrove forest. Data are analyzed by crosstab to examine the relationship between knowledge and perception, knowledge and participation, and perception and participation. The research result shows that the community knowledge about the benefits of mangrove forests is high, which is 68%. Knowledge of damage is low, which is 74%, but the knowledge of damage prevention is high, which is 77%. The community perception of benefits, damages and prevention is high at 68%, 55% and 49%. Community participation in training of the important existence and mangrove forest utilization is low, which is 65%, and 61%, while participation in the prevention of damage is high, which is 49%.

Keywords: *Community Participation; Mangrove Forest; Preservation.*

ABSTRAK

Salah satu daerah di NTT yang memiliki hutan mangrove di sepanjang garis pantai adalah Kota Kupang, khususnya daerah Oesapa Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, hutan mangrove ini telah dijadikan sebagai daerah wisata. Di lain sisi, sebagian luasan hutan mangrove telah diperuntukkan untuk area pertambakan dan hal ini merupakan indikasi awal kerusakan hutan mangrove. Guna menjamin keberlangsungan maka diperlukan upaya pelestarian yang tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu kajian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Sebanyak 31 responden diwawancarai dengan menggunakan kuesioner, diambil secara *purposive*. *Indepth interview* dilakukan kepada lima orang warga sebagai informan kunci. Data meliputi kondisi sosio-ekonomi, pengetahuan, persepsi, dan peran serta masyarakat mengenai hutan mangrove. Data dianalisis secara *crosstab* guna mengkaji hubungan pengetahuan dan persepsi, pengetahuan dan partisipasi, serta persepsi dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan mangrove tergolong tinggi, yaitu 68%. Pengetahuan tentang kerusakan tergolong rendah, yaitu 74%, tetapi pengetahuan mengenai pencegahan kerusakan tergolong tinggi, yaitu 77%. Persepsi masyarakat terhadap manfaat, kerusakan, dan pencegahan tergolong tinggi, yaitu 68%, 55% dan 49%. Peran serta masyarakat dalam penyuluhan pentingnya keberadaan dan pemanfaatan hutan

mangrove tergolong rendah, yaitu 65% dan 61%, sedangkan peran serta dalam pencegahan kerusakan tergolong tinggi yaitu 49%.

Kata Kunci: *Hutan Mangrove; Partisipasi Masyarakat; Pelestarian.*

PENGANTAR

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang juga memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove di NTT tidak sebanyak hutan mangrove yang berada di pulau-pulau besar di Indonesia karena kondisi alam di NTT yang membatasi pertumbuhan mangrove, seperti kurangnya muara sungai yang besar di NTT sehingga pertumbuhan mangrove yang ada sangat tipis (Surya, 2009). Berdasarkan data Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) wilayah I Bali (2011), kondisi hutan mangrove di NTT cukup memprihatinkan, sebagian besar mengalami kerusakan dengan tingkatan yang berbeda, yaitu sebanyak 8.285,10 ha atau 20,40% (kategori rusak berat), 19.552,44 ha atau 48,14% (kategori rusak ringan), dan 12.776,57 ha atau 31,46% (kategori baik). Data ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan mangrove sangat tinggi karena hanya sepertiga dari total luas hutan mangrove yang masih dalam kondisi baik, selebihnya telah mengalami kerusakan sebagai dampak dari berbagai bentuk pemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara Surya (2009) dengan Joseph Diaz sebagai Kepala Dinas Kehutanan NTT, dari 40.695 hektar luas hutan mangrove di NTT sekitar 9.989 hektar (2,25 persen) sudah banyak yang mengalami tekanan diantaranya akibat penebangan hutan mangrove oleh masyarakat untuk kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar, dan pembangunan tambak.

Salah satu kabupaten di NTT yang memiliki hutan mangrove di sepanjang garis pantai adalah Kabupaten Kota (Kupang), khususnya daerah Oesapa Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, hutan mangrove ini telah dijadikan sebagai daerah wisata yang tentunya akan berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Di lain sisi, sebagian

bagian dari luasan hutan mangrove ini telah diperuntukkan untuk area pertambakan, dan sebagian lain diperuntukkan untuk pembibitan spesies mangrove. Peruntukkan sebagai area pertambakan tentunya merupakan indikasi



awal kerusakan hutan mangrove tersebut.

Gambar 1. Area Tambak Di Kawasan Hutan Mangrove Oesapa Barat

Sumber: Dokumen Pribadi, 2016

Dengan melihat kondisi yang demikian, guna menjamin keberlangsungan hutan mangrove ke depan, maka diperlukan upaya pelestarian hutan mangrove. Jika hal ini tidak dikelola secepatnya, maka kerusakan hutan mangrove akan semakin luas. Upaya pelestarian ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat sebagai pengguna dan pelestari hutan mangrove itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya kajian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di daerah Oesapa Barat, Kota Kupang. Partisipasi masyarakat ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, pengetahuan dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat memiliki kontribusi terhadap peran serta yang dimiliki oleh masyarakat.

Penelitian ini telah dilaksanakan di Oesapa Barat, Kota Kupang, pada bulan Oktober 2016. Sebanyak 31 responden diambil untuk diwawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk memperoleh data. Responden diambil secara *purposive*. Responden adalah kepala rumah tangga yang bermukim di sekitar hutan mangrove dan menggunakan hasil hutan mangrove untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Sugiyono, 2014a).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Data yang dibutuhkan meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan pokok, pendapatan, serta pengetahuan, persepsi, dan peran serta masyarakat mengenai hutan mangrove. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel kemudian dianalisis lagi secara *cross tab* guna mengkaji hubungan antara pengetahuan dan persepsi, pengetahuan dan partisipasi, serta hubungan antara persepsi dan partisipasi. Data dianalisis secara deskriptif.

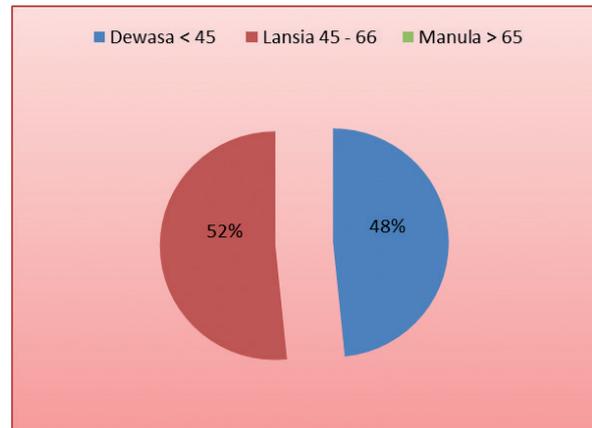
PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dikaji meliputi umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, dan pekerjaan sampingan serta pendapatan. Masyarakat yang dijadikan sebagai responden sebanyak 31 orang yang terdiri atas 19 pria dan 12 wanita. Responden adalah mereka yang bermukim di sekitar hutan mangrove. Sebagian besar usia masyarakat berkisar antara 45-66 tahun dan tergolong lansia dengan persentase sebesar 52%, diikuti dengan kisaran umur <45 tahun sebesar 48% dan tergolong dewasa dan sebesar 0% yaitu masyarakat yang tergolong manula. Persentase masyarakat berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2.

Jika mengacu pada produktivitas, maka dari persentase data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di lokasi penelitian tergolong dalam kategori umur produktif atau dengan kata lain potensi sumberdaya manusianya cukup tersedia. Besarnya jumlah penduduk yang berada pada kisaran usia produktif dan sangat produktif ini juga akan sangat

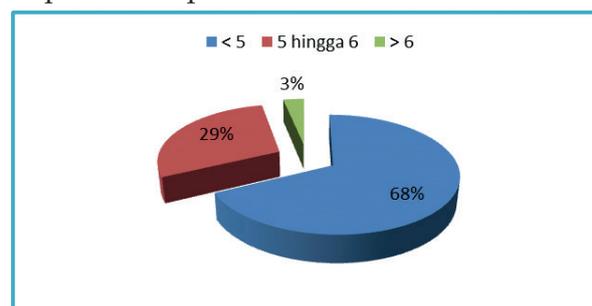
mendukung pada partisipasinya dalam kegiatan pembangunan, khususnya dalam kasus ini pengelolaan hutan mangrove untuk ke depannya (Erwiantono, 2006).



Gambar 2. Persentase Kelompok Usia Masyarakat

Sumber: Data Primer, diolah.

Jika ditinjau dari jumlah keluarga, maka sebagian masyarakat memiliki jumlah anggota keluarga <5 orang, dengan persentase sebesar 67,7%, diikuti oleh persentase jumlah anggota keluarga 5-6 orang dengan persentase 29%, dan anggota keluarga >6 orang dengan persentase 3,2%. Gambaran mengenai persentase jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Gambar 3.

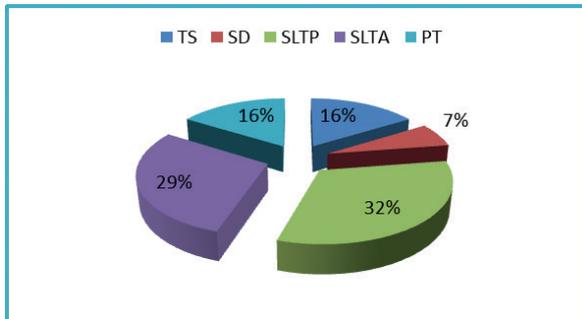


Gambar 3. Persentase Jumlah Anggota Keluarga

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari segi tingkat pendidikan, sebesar 32% masyarakat menamatkan pendidikan mereka pada bangku SMP, diikuti 29% menamatkan pendidikan pada bangku SMA, sebanyak 16% tidak mengenyam pendidikan sama sekali (tidak sekolah), 7% menamatkan pendidikan pada

bangku SD, dan sebesar 16% menamatkan pendidikan mereka di bangku perguruan tinggi. Gambaran mengenai persentase tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sumber: Data Primer, diolah.

Tingkat pendidikan masyarakat setempat yang tergolong rendah ini dapat mengakibatkan pola berfikir dan bertindak masyarakat tersebut dalam mempertimbangkan sesuatu keputusan terbatas, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kondisi tingkat pendidikan yang rendah ini juga akan menjadi kendala dalam upaya partisipasi pengelolaan ekosistem mangrove yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan dapat berimplikasi pada (1) rendahnya tingkat adopsi inovasi, (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kawasan, dan (3) perilaku yang tidak berwawasan lingkungan dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya (Erwiantono, 2006). Tingkat pendidikan juga mempengaruhi bagaimana individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Disamping itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi motivasi dalam berpartisipasi (Rusdianti dan Satyawan, 2012).

Jika ditinjau dari segi pekerjaan maka masyarakat yang dijadikan sebagai responden memiliki pekerjaan yang bervariasi. Ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, pegawai swasta, buruh nelayan/tambak, wiraswasta, tukang, petani tambak, pedagang, guru, dan sopir. Ada pula yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Jika ditinjau dari segi penghasilan, maka sebesar 67,7% berpenghasilan di bawah

Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kupang (UMR Kota Kupang Rp 1.500.000) dan sebesar 32,3% berpenghasilan di atas UMR. Dari segi penghasilan, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat dari aspek pendapatan tergolong kelompok masyarakat miskin (Ritohardoyo dan Ardi, 2011). Hubungan pendapatan dengan kegiatan partisipasi suatu kegiatan, kemiskinan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Selain itu ambisi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu juga mempunyai hubungan dengan tingkat ekonomi keluarganya. Jadi dengan tingkat pendapatan yang lebih baik/tinggi dapat mendorong seseorang berpartisipasi lebih baik/tinggi pula (Erwiantono, 2006).

Pengetahuan Masyarakat terhadap Hutan Mangrove

Kajian mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hutan mangrove ditinjau berdasarkan tiga aspek, yaitu pengetahuan tentang manfaat, kerusakan, dan pencegahan terhadap kerusakan hutan mangrove. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan mangrove tergolong tinggi yaitu sebesar 68%. Pengetahuan tentang kerusakan tergolong rendah yaitu sebesar 74%, tetapi pengetahuan mengenai cara pencegahan kerusakan tergolong tinggi yaitu sebesar 77%.

Dari hasil analisis diketahui bahwa masyarakat secara umum mengetahui tentang pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan mereka. Hal ini nampak dari jawaban mereka bahwa hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, melindungi dari hempasan gelombang sehingga mencegah pengikisan tanah, melindungi tempat bertelur serta pembesaran ikan dan hewan laut lainnya. Mengenai pengetahuan tentang kerusakan hutan mangrove, masyarakat masih memiliki pengetahuan yang rendah. Masyarakat tidak mengetahui dampak dari kerusakan hutan mangrove berupa terjadinya pengikisan pantai, tidak terdapatnya tempat untuk ikan dan binatang laut bertelur serta hasil tangkapan kepiting dan ikan di hutan mangrove ataupun laut makin sedikit. Pengetahuan masyarakat

mengenai cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove juga tergolong rendah di mana masyarakat belum mengetahui cara-cara atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove yang lebih luas lagi.

Persepsi Masyarakat terhadap Hutan Mangrove

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap manfaat, kerusakan, dan cara pencegahan hutan mangrove tergolong dalam kategori tinggi yaitu sebesar 68%, 55%, dan 49%. Secara umum, ditinjau dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keberadaan mangrove adalah penting.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, maka bagian yang sangat menentukan dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut adalah masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat sangat tergantung kepada kondisi dan potensi sumberdaya alam serta lebih merasakan dampak di kawasan tersebut, atau dengan kata lain baik buruknya pengelolaan ekosistem mangrove tergantung dari partisipasi masyarakat setempat (Erwiantono, 2006).

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyuluhan pentingnya keberadaan hutan mangrove tergolong rendah, yaitu sebesar 65%. Peran serta dalam penyuluhan tergolong rendah karena beberapa kali pemerintah setempat mengadakan rapat bersama masyarakat, tetapi yang mengikuti rapat-rapat tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh salah satu ibu yang bermukim di sekitar kawasan mangrove.

Peran serta dalam pemanfaatan tergolong rendah, yaitu sebesar 61%. Hal ini dikarenakan karena adanya aturan oleh pemerintah setempat yang melarang masyarakat untuk

mengambil sumberdaya yang berada dalam kawasan mangrove tersebut. Barangsiapa yang mengambil akan dikenakan denda. Aturan ini baru diterapkan sekarang. Akan tetapi, zaman dahulu sebelum kawasan tersebut dikelola sebagai daerah ekowisata, masyarakat dapat secara leluasa mengambil sumberdaya yang ada, untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka setiap hari tanpa rasa takut karena aturan.

Peran serta dalam pencegahan kerusakan tergolong tinggi, yaitu 49%. Hal ini nampak berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat bersama dengan mahasiswa telah mengadakan penanaman semaian mangrove di kawasan hutan mangrove tersebut. Akan tetapi, ada beberapa semaian yang mati, dan ada juga yang hidup. Semaian yang mati ini diduga tidak ditanam berdasarkan zonasi dan habitat dari jenis semaian tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Muryani, *dkk.*, (2011).

Hasil penelitian Muryani, *dkk.*, (2011) menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat pesisir mengetahui fungsi ekonomis dan ekologis hutan mangrove tetapi kurang mempunyai rasa "memiliki" dan acuh tak acuh terhadap kerusakan hutan mangrove. Perilaku merusak dengan menebang vegetasi mangrove karena penduduk menganggap yang ditebang adalah hasil tanamannya sendiri atau hasil tanaman orang tuanya atau tanaman liar. Menurut pemikiran penduduk, asal tidak menebang hasil tanaman pemerintah, mereka merasa tidak bersalah (tidak melanggar hukum). Dengan alasan itu, penghijauan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah semakin rusaknya hutan mangrove justru malah dirusak penduduk di beberapa tempat (kasus Desa Semare, Kecamatan Kraton).

Rusdianti dan Satyawan (2012) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi bagaimana individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seperti pada kegiatan rehabilitasi mangrove. Di samping itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi motivasi dalam berpartisipasi. Semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove dan tidak mementingkan keuntungan secara ekonomi semata. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam

kegiatan rehabilitasi mangrove yang hanya mendapatkan keuntungan semata.

Analisis secara *crossstab* digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan persepsi masyarakat. Hasil analisis *crossstab* mengenai pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Manfaat Hutan Mangrove

Pengetahuan tentang Manfaat Hutan Mangrove		Persepsi tentang Manfaat Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	21	0	0	21
	%	68	0	0	68
Sedang	Jumlah	0	5	0	5
	%	0	16	0	16
Rendah	Jumlah	0	0	5	5
	%	0	0	16	16
Total	Jumlah	21	5	5	31
	%	68	16	16	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Berdasarkan hasil analisis *crossstab* pada Tabel 1, terlihat jelas bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat hutan mangrove juga memiliki persepsi yang baik pula terhadap hutan mangrove. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan sedang juga akan memiliki persepsi sedang. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah akan memiliki persepsi yang rendah pula. Ritohardoyo (2005) mengungkapkan bahwa dengan pengetahuan yang tinggi akan

mempengaruhi orang untuk mendudukkan sesuatu pada perspektif yang benar. Dengan persepsi yang benar akan menyebabkan orang bertindak rasional dan memilih risiko kecil atau berperilaku sesuai anjuran. Persepsi ditentukan oleh pengalaman, dan pengalaman itu dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan dan emosi manusia serta menjadi sumber sistem nilai atau norma.

Tabel 2. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Kerusakan Hutan Mangrove

Pengetahuan tentang Kerusakan Hutan Mangrove		Persepsi tentang Kerusakan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	6	0	0	6
	%	19	0	0	19
Sedang	Jumlah	0	2	0	2
	%	0	7	0	7
Rendah	Jumlah	11	4	8	23
	%	35	13	26	74
Total	Jumlah	17	6	8	31
	%	54	20	26	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Berbeda dengan hasil analisis *crosstab* mengenai manfaat hutan mangrove, pengetahuan yang baik dari masyarakat mengenai kerusakan hutan mangrove (Tabel 2) tidak sebanding dengan persepsi mereka. Yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi akan kerusakan hutan mangrove, justru memiliki persepsi yang rendah. Hal ini dapat dijelaskan karena masyarakat masih memiliki persepsi

yang keliru mengenai penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove disertai dengan dampak yang timbul karenanya. Ngakan, *dkk.*, (2006) mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki persepsi sedang dan rendah karena masyarakat menyadari bahwa mereka bergantung hidup dari sumber daya hutan mangrove yang ada, tetapi tidak memahami kalau hutan mangrove juga perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat diperoleh secara berkelanjutan.

Tabel 3. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove

Pengetahuan tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove		Persepsi tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	15	9	0	24
	%	48	29	0	67
Sedang	Jumlah	0	2	0	2
	%	0	6	0	6
Rendah	Jumlah	0	4	1	5
	%	0	13	4	17
Total	Jumlah	15	15	1	31
	%	48	48	4	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Hasil analisis *crosstab* mengenai pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove (Tabel 3) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah justru memiliki persepsi yang sedang. Ada juga masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi, tetapi memiliki persepsi sedang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada hutan mangrove, tetapi memiliki persepsi

sedang dan rendah karena masyarakat menyadari bahwa mereka bergantung hidup dari sumber daya hutan mangrove yang ada, tetapi tidak memahami kalau hutan mangrove juga perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat diperoleh secara berkelanjutan (Ngakan, *dkk.*, 2006).

Analisis secara *crosstab* digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis *crosstab* mengenai pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove

Pengetahuan tentang Pemanfaatan Hutan Mangrove		Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	0	12	9	21
	%	0	39	29	68
Sedang	Jumlah	0	0	0	0
	%	0	0	0	0

Lanjutan Tabel 4.

Pengetahuan tentang Pemanfaatan Hutan Mangrove		Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Rendah	Jumlah	0	0	10	10
	%	0	0	32	32
Total	Jumlah	0	12	19	31
	%	0	39	61	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Berdasarkan hasil analisis *crosstab* pada Tabel 4 terlihat bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat dari keberadaan hutan mangrove, memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pemanfaatannya. Rendahnya pemanfaatan hutan mangrove berkaitan dengan informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara mendalam dengan salah satu warga, bahwa pada zaman dahulu warga sekitar mengambil sumberdaya yang berada dalam hutan mangrove untuk digunakan sehari-hari. Akan tetapi, saat ini mereka tidak lagi memanfaatkan sumberdaya yang ada, karena telah adanya aturan dari pemerintah bahwa masyarakat yang mengambil sumberdaya atau menebang atau tidak menjaga kawasan hutan mangrove akan dikenakan denda. Aturan dan denda tersebut telah dipasang di kawasan hutan mangrove, tetapi menurut pengakuan pengelola hutan mangrove, aturan dan denda yang telah dipasang disobek oleh pengunjung sehingga saat ini tidak ada lagi papan pengumuman yang berisi aturan dan denda. Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang No 21 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir terutama pasal 64 ayat 1 mengatakan bahwa Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 45 sehingga merusak lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan untuk sanksi dan denda tentang hutan mangrove belum disusun peraturannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Ga (2016) bahwa dilarang membuang sampah langsung ke laut, atau ke

lokasi hutan karena di sekitar lokasi sudah disediakan tempat sampah. Pelanggaran lainnya termasuk kegiatan bersama yang merusak secara langsung pohon mangrove (bakau) yang ada serta air laut yang ada. Jenis sanksi masih sedang disiapkan pemerintah. Akan tetapi, penerapannya akan dilakukan setegas-tegasnya.

Tim International Fund For Agricultural Development (2016) mengemukakan bahwa beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Oesapa Barat terdapat ekosistem mangrove yang masih relatif stabil, tetapi semakin tipis jika dibandingkan dengan keadaan beberapa puluh tahun silam, dan pada bagian tertentu, ekosistem pantai di Kelurahan Oesapa Barat telah mengalami degradasi sehingga turut mempengaruhi tingginya laju sedimentasi yang terjadi di wilayah tersebut. Semakin menipisnya sumberdaya hutan mangrove akibat pengaruh faktor alam dan faktor buatan manusia, seperti dieksploitasi untuk kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan, kegiatan pengambilan/penambangan batu karang, sehingga Pemerintah Kota Kupang telah menjadikannya sebagai kawasan yang perlu dilakukan penanaman kembali sebagai daerah perkembangbiakan biota laut dan secara fisik mencegah abrasi pantai. Hasil kajian lain menunjukkan pemanfaatan mangrove secara langsung dengan memanfaatkan kayu yang telah benar-benar kering atau terbawa arus di pesisir pantai, karena adanya peraturan dari pemerintah setempat dan kesepakatan dari mereka sendiri. Jikalau peraturan ini dilanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi seperti yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, biasanya daun dan anakan mangrove yang masih muda dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Hal ini terlihat dengan adanya ternak seperti kambing dan babi yang berkeliaran di

sekitar hutan mangrove untuk memanfaatkan daun dan anakan mangrove sebagai bahan makanan.



Gambar 5. Papan pengumuman tentang peraturan dan denda



Gambar 6. Papan Pengumuman bagi Pengunjung

Tabel 5. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove

Pengetahuan tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove		Partisipasi dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	16	8	0	24
	%	52	26	0	78
Sedang	Jumlah	0	2	0	2
	%	0	6	0	6
Rendah	Jumlah	0	4	1	5
	%	0	12	4	16
Total	Jumlah	16	14	1	31
	%	52	44	4	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Ritohardoyo dan Ardi (2011) mengemukakan bahwa ada kecenderungan makin tinggi tingkat pengetahuan penduduk tentang hutan mangrove, makin tinggi partisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove. Ritohardoyo (2009) berpendapat bahwa keberadaan usaha pelestarian hutan bukan hanya bergantung pada ada tidaknya partisipasi pemerintah dan masyarakat, tetapi sangat bergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Hal itu tergantung pada pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dari hutan. Hasil penelitian Ritohardoyo (2009) berbeda dengan hasil penelitian ini, bedanya bahwa

(pada Tabel 5) masyarakat yang memiliki pengetahuan yang benar dapat saja memiliki tingkat partisipasi sedang. Akan tetapi, secara umum nampak bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin rendah pula tingkat partisipasinya.

Analisis secara *crossstab* digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis *crossstab* mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove

Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove		Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	0	7	14	21
	%	0	23	45	68
Sedang	Jumlah	0	5	0	5
	%	0	16	0	16
Rendah	Jumlah	0	0	5	5
	%	0	0	16	16
Total	Jumlah	0	12	19	31
	%	0	39	61	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Dari hasil analisis (Tabel 6) terlihat bahwa semakin tinggi persepsi masyarakat tidak selalu berimplikasi pada tingginya partisipasi. Masyarakat yang memiliki persepsi tinggi dapat saja memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pemanfaatan hutan mangrove. Rendahnya tingkat pemanfaatan disebabkan karena adanya aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga membuat masyarakat tidak dapat secara sembarangan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Persepsi berhubungan dengan suatu proses dimana suatu individu menerima informasi dari lingkungan sosial dan fisik, dan menafsirkan dalam pengalaman sikapnya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku, dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya (Ariesti, 2013). Persepsi masyarakat menurut Rakhmat (2003) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (kebaruan dan perulangan) dan internal (minat, kondisi biologis, dan kebiasaan).

Tabel 7 Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove

Persepsi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove		Partisipasi dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove			
		Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Tinggi	Jumlah	15	0	0	15
	%	48	0	0	48
Sedang	Jumlah	1	14	0	15
	%	4	44	0	48
Rendah	Jumlah	0	0	1	1
	%	0	0	4	4
Total	Jumlah	16	14	1	31
	%	52	44	4	100

Sumber: Analisis data primer (2016)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, terlihat bahwa masyarakat yang memiliki persepsi tinggi mengenai cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove,

juga memiliki partisipasi yang tinggi pula. Kecenderungan ini sesuai dengan hasil penelitian Ritohardoyo dan Ardi (2011) di mana semakin tinggi tingkat persepsi terhadap

keberadaan hutan mangrove, maka semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan hutan mangrove.

Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove

Sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan hutan mangrove dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan mangrove sangat penting untuk dilakukan lagi, karena sekalipun sosialisasi telah dilakukan beberapa kali, tetapi belum terlalu menunjukkan dampak yang signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat belum terlalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi yang telah diadakan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penanaman *seedling* spesies berdasarkan zonasi hutan mangrove penting untuk dilakukan karena jika penanaman *seedling* dilakukan secara sembarangan hal ini juga berdampak pada gagalnya upaya pelestarian.

Pemerintah setempat sebagai pengambil dan pembuat keputusan hendaknya perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dibandingkan dengan aspek ekonomi karena jika hutan mangrove diubah peruntukkannya (dalam hal ini aspek ekonomi lebih diprioritaskan) maka akan berdampak pada tidak adanya penahan hempasan saat naiknya air laut, terlebih pada musim penghujan sehingga dapat menggenangi area permukiman warga di mana area permukiman ini jaraknya tidak begitu jauh dari laut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberadaan hutan mangrove. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat mengenai kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove tergolong rendah. Pengetahuan yang cukup ini berimplikasi pada tingginya persepsi masyarakat mengenai hutan mangrove baik itu manfaat, kerusakan, dan pencegahan terjadinya kerusakan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal pemanfaatan, penyuluhan tentang pentingnya keberadaan hutan

mangrove maupun pengelolaannya. Dari sisi pemerintah, pemerintah telah berupaya mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, tetapi masyarakat belum begitu berpartisipasi aktif. Sosialisasi kepada seluruh pihak baik itu *stakeholder* maupun masyarakat sangat penting untuk dilakukan mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pengelolaan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesti, M. D., 2013. Kajian Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (HKM)/Hutan Desa di Provinsi Bengkulu. (Internet) <<http://uripsantoso.wordpress.com/2013/01/16/kajian-keberhasilan-hutan-kemasyarakatanhkmhutan-desa-di-propinsi-bengkulu/>>(diakses pada tanggal 16 November 2014).
- Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah I, (2011). *Statistik Pembangunan*. Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, Denpasar - Bali.
- Erwiantono, 2006. *Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang-Banyuwangi (The community participation in mangrove ecosystem managementin Pangpang Bay, Muncar - Banyuwangi)*. EPP 3: 44-50.
- Ga, T. J. 2016. Jembatan Bakau di Kupang diperpanjang. (Internet) <<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/16/08/06/obh1dy384-jembatan-wisata-bakau-kupang-diperpanjang>> (Diakses pada tanggal 22 Januari 2018).
- Muryani C., Ahmad., S. Nugraha dan T. Utami. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Pantai Pasuruan Jawa Timur (*Public Empowering Model in Maintaining and Conserving Mangrove Forest in*

- Pasuruan Beach, East Java). *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 18: 75-84.
- Ngakan, P. O., H. Komarudin, A. Achmad, Wahyudi, dan A. Tako. 2006. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan: Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan*. Center for International Forestry Research. Jakarta.
- Rakhmat, J. 2003. *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ritohardoyo, Su. 2005. Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Hutan Mangrove di Pesisir Utara Pulau Sumbawa. *Laporan Penelitian*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.
- Ritohardoyo, Su. 2009. *Ekologi Manusia. Bahan Ajar*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ritohardoyo, Su., dan G. B. Ardi. 2011. *Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Geografi* 8: 83-94.
- Rusdianti dan Satyawan, 2012. Konversi Lahan Hutan Mangroveserta Upaya Penduduk Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6: 1-17.
- Sugiyono., 2014a. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Surya, 2009. Hampir Sekitar 10.000 Hutan Bakau NTT Rusak. <dalam antaranews.com><diakses pada tanggal 20 Mei 2016>.
- Tim International Fund For Agricultural Development, 2016. Inventroy Sumberdaya Wilayah Pesisir Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. (Internet) <<http://ccdp-ifad.org>> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2018).